BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dampak dari perang dunia ke dua adalah perpecahan dan kemiskinan yang terjadi di negara-negara di seluruh dunia khususnya di kawasan Eropa, keadaan ini terus berlanjut hingga akhirnya pada tahun 1950 Robert Schuman menteri luar negeri Prancis memiliki sebuah ide untuk menyatukan Eropa, dimulai dari kerjasama produksi baja dan batu bara antara Prancis dan Jerman yang nantinya di proyeksi akan terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, rencana ini bertujuan mengembalikan perekonomian negara-negara di Eropa sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang kembali. Sejak itulah usaha untuk mempersatukan Eropa dimulai. Pada juli 1952 keinginan itu terwujud dengan penandatanganan perjanjian pendirian Kerjasama Batu Bara dan Baja Eropa atau *European Coal and Steel Community (ECSC)* oleh enam negara, yaitu Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Italia. Keenam Negara tersebut selanjutnya disebut The Six State (http://europa.eu/about-eu/eu-history/foundingfathers/pdf/robert_schuman_ en.pdf diakses 26/8/2013).

Keberhasilan ECSC lalu mendorong negara-negara *The Six State* membentuk kerjasama yang lebih lanjut mencakup sektor-sektor ekonomi. Hasil pertemuan di Messina, pada tanggal 1 Juni 1955 adalah menunjuk Paul Henry Spaak (Menlu Belgia) sebagai ketua komite yang bertugas menyusun laporan

tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Laporan Komite Spaak berisi dua rancangan yang lebih mengintegrasikan Eropa, yaitu:

1. Membentuk *European Economic Community (EEC)* atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE);
2. Membentuk *European Atomic Energy Community (Euratom)* atau Badan Tenaga Atom Eropa.

Rancangan Spaak itu disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma dan kedua perjanjian itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 1958. Kemajuan ekonomi mulai dirasakan Eropa hingga pada tahun 1965 terjadi penandatanganan perjanjian oleh *ECSC, EEC, Euratom* untuk bersatu kedalam *European Community (EC).* Dengan demikian, terdapat tiga organisasi di Eropa, yaitu *ECSC, EEC (MEE), dan Euratom (EAEC)*.Pada konferensi di Brussel tanggal 22 Januari 1972, Inggris, Irlandia, dan Denmark bergabung dalam MEE.Pada tahun 1981 Yunani masuk menjadi anggota MEE yang kemudian disusul Spanyol dan Portugal.Dengan demikian keanggotaan MEE sebanyak 12 negara (http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/pdf/paul-henrispaak.en. pdf diakses 26/8/2013).

Treaty *on European Union (TEU)* yang ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah *European Communities (EC)* menjadi *European Union (EU)*Uni Eropa. TEU mencakup, memasukkan dan memodifikasi traktat-traktat terdahulu (ECSC, Euratom dan EEC). Jika *Treaties establishing European Community (TEC)* memiliki karakter integrasi dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat,

maka TEU menambahkan karakter lain yaitu kerjasama dibidang *Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan Justice and Home Affairs (JHA)* (Surya, 2009 : 136-145).

Uni Eropa kemudian maju pesat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar menaungi anggotanya. Hal ini lah yang menarik negara lain untuk masuk menjadi anggota dan salah satunya adalah Turki. Dalam catatan sejarah, Turki memang selalu menunjukkan minat yang sangat besar untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa.Besarnya minat ini ditunjukkan dengan bergabungnya Turki ke berbagai kegiatan yang ada di Eropa.Negara ini pernah menjadi anggota *Council of Europe* pada tahun 1949, kemudian menjadi *associate member of European Union* pada tahun 1963. Turki juga salah satu negara pendiri *Organization for Economic Co-operation and Development* pada tahun 1961 dan juga *Organization Security and Co-operation in Europe* pada tahun 1971 (*http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/eu/turkeyrelationsen.htm.*diakses 3/10/2012).

Tahap awal permohonan keanggotaan Turki dapat terhitung sejak tahun 1959, saat negara ini permohonan untuk bergabung menjadi anggota *European Economic Community*. Kemudian berlanjut pada penanda-tanganan perjanjian Ankara pada tahun 1963, yang menjelaskan pembentukan asosiasi antara *European Economic Community* dan Turki demi penguatan dan keseimbangan yang berkelanjutan dalam perdagangan antara anggota *European Economic Community* dan Uni Eropa.Perjanjian Ankara juga menggaris bawahi bahwa Uni Eropa secara penuh memperhatikan kebutuhan Turki untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja serta kualitas kehidupan masyarakatnya.Perjanjian Ankara dapat dilihat sebagai titik temu antara kepentingan Eropa dan kepentingan dalam negeri Turki.Upaya Turki ini berlanjut pada tahun 1965, saat dilakukan penambahan protokol dalam perjanjian Ankara untuk mempersiapkan Turki memasuki *custom union* bersama *European Economic Community* (Arikan, 2006:55).

Keaktifan Turki dalam berbagai kegiatan di Eropa ini membuat Turki memberanikan diri untuk mengajukan lamaran menjadi anggota *European Economic Community* secara penuh pada tanggal 14 April 1987.Pengajuan Turki ini kembali mendapatkan penolakan karena ada beberapa perbedaan antara Turki dengan *European Economic Community*.Eropa mengharuskan Turki untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu terutama dalam hal masalah ekonomi.Namun Turki tidak patah semangat, bahkan semakin aktif menyesuaikan diri dan menarik simpati dari Eropa.Turki menjadi anggota *Western European Union* pada tahun 1992, lalu aktif juga pada *Western Union and Others Group (WEOG)* di PBB.Usaha Turki ini ternyata membuahkan hasil dengan diundangnya Turki untuk menandatangani *Customs Union Agreement* pada tahun 1995. Turki diundang pula pada *Helsinki Summit of the European Council* pada tanggal 12 Desember 1999 untuk membahas masalah kandidatnya sebagai anggota Uni Eropa(www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa diakses pada 4/10/12).

Pada tahun 1999 Turki akhirnya berhasil menjadi kandidat anggota Uni Eropa, Turki berupaya melakukan penyesuaian diri, sesuai dengan yang

tercantum pada Kriteria Kopenhagen.Dimana setiap anggota Uni Eropa harus patuh pada undang-undang Uni Eropa. Dalam prosesnya Turki membuat perubahan pada undang-undang, diantaranya memperbolehkan pemberitaan dan proses pendidikan menggunakan bahasa Kurdi yang selama ini dilarang di Turki. Serta memberikan hak-hak yang kaum minoritas tidak dapatkan selama ini (www.abgs.gov.tr/files/pub/prt.pdf diakses 5/10/2012).

Strategi politik dan ekonomi Turki mengalami perubahan dengan lebih mendekatkan diri pada negara-negara Eropa (Barat) yang dianggap sebagai negara yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan Turki.Faktor ekonomi adalah faktor utama ketertarikan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa, Uni Eropa memiliki perekonomian terbesar dan terkaya di dunia dan merupakan kekuatan perdagangan pertama di dunia, perdagangan di Uni Eropa memegang lebih dari sepertiga dari total perdagangan dunia. ekonomi di Uni Eropa diperkirakan akan semakin tumbuh pesat selama dekade berikutnya (www.university-world.com/europe/europeeconomy.html diakses 25/8/2013).

Masyarakat Turki yang pro terhadap Uni Eropa beranggapan bahwa perekonomian dan kesejahteraan mereka akan meningkat bila Turki sudah menjadi anggota Uni Eropa. Turki berharap investasi asing dari Barat akan mengalir ke negara mereka. Apalagi dengan 74 juta penduduk Turki yang pekerjanya rela dibayar murah, Turki memiliki potensi besar untuk dijadikan tempat membangun pabrik, sekaligus tempat pemasaran produk-produk Barat. Dibandingkan dengan Eropa yang angka kelahirannya sangat rendah, bahkan

minus di beberapa negara dan tenaga kerja yang tersedia menuntut gaji tinggi (*http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/turkey/*diakses 4/10/2012).

Perekonomian Turki terus tumbuh dan semakin maju. Pertumbuhan ekonomi Turki yang bagus dan bisa cepat bangkit dari krisis menambah semangat Turki untuk bergabung dengan Uni Eropakarena seperti yang kita ketahui laju pertumbuhan ekonomi suatu negara sebelum dan sesudah bergabung dengan Uni Eropa jelas terlihat perbedaannya. Negara yang bergabung dengan Uni Eropa harus menyesuaikan pertumbuhan ekonominya dengan negara-negara besar di Uni Eropa dan hal ini memberikan efek yang sangat cepat merangsang pertumbuhan ekonomi negara yang baru bergabung.Ditambah lagi dengan kestabilan mata uang Uni Eropa yang tentunya menguntungkan bagi negara-negara Uni Eropa sendiri. Kemudian adanya paket bantuan dari Uni Eropa kepada negara-negara anggota Uni Eropa yang tergolong masih terbelakang dari anggota lain ikut mendorong faktor Turki bergabung dalam Uni Eropa (www.*dergiler.ankara.tr/dergiler/16/13229.pdf* diakses 13 juni 2012).

Faktor keamanan juga menjadi alasan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa, Seperti yang kita ketahui Turki memiliki sejarah baik dengan negara-negara Eropa.Dimulai dari perang 30 tahun, Perang Dunia I dan disusul Perang dunia II.Turki menganggap Uni Eropa dapat mempersatukan dan menjaga stabilitas keamanan antara negara Eropa beserta kawasannya. Keberadaan Jerman, Perancis, Inggris, dan negara-negara besar lainnya semakin meyakinkan Turki bahwa Uni Eropa merupakan wilayah strategis untuk membentuk sebuah

aliansi besar demi terciptanya pertahanan dan keamanan di dalam maupun di luar negeri.

Turki memiliki alasan tersendiri untuk dapat bergabung kedalam Uni Eropa, Jika Turki berhasil bergabung kedalam Uni Eropa, maka kekuatannya di tingkat regional akan menjadi semakin kuat karena Turki memiliki kawasan ekonomi yang sangat luas dan juga kekuatan militer yang sangat besar pula karena secara tidak langsung keanggotaannya di Uni Eropa akan memperkuat posisinya di NATO. Posisi ini akan menjadi daya tawar Turki dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Timur Tengah dan sekitarnya. Daya tawar yang dimiliki Turki tersebut dapat dimanfaatkan oleh Uni Eropa untuk turut serta dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Jika Turki menjadi anggota Uni Eropa, maka negara ini akan menjadi kepanjangan tangan Uni Eropa terutama dalam hal memperjuangkan kepentingannya di Timur Tengah.

Turki menilai memiliki hubungan dengan Uni Eropa sangat menguntungkan Turki melihat bahwa kawasan Eropa lebih stabil baik dilihat dari segi keamanan maupun dari segi ekonomi dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain yang ada di sekitar Turki.Jika Turki berhasil bergabung kedalam Uni Eropa, maka kekuatannya di tingkat regional akan menjadi semakin kuat karena memiliki kawasan ekonomi yang sangat luas dan juga kekuatan militer yang sangat besar pula karena secara tidak langsung keanggotaannya di Uni Eropa(www.*ecfr.eu/page/-/Multipolar_Europe_Turkish.pdf* diakses 11/10/2012).

Untuk bergabung dengan Uni Eropa tidaklah mudah, Turki harus segera menyelesaikan masalah masalah dalam negerinya terlebih dahulu, dalam kriteria politik contohnya, Uni Eropa melihat Turki masih memiliki banyak masalah pelanggaran HAM, diantaranya adalah masalah kaum minoritas Kurdi, Sejarah pertikaian antara Turki dengan suku Kurdi sudah berlangsung sangat lama. Mayoritas suku Kurdi memang tinggal di Turki bagian tenggara dan lebih setengahnya hidup berbaur di ibukota Ankara.Kurdi menjadi salah satu hambatan gerakan nasionalisme dan sekularisme Turki. Meskipun mereka berhasil mendirikan Negara Darurat Kurdistan di wilayah Turki pada tahun 1922-1924 dan Republik Mahabad Kurdistan tahun 1946 tetapi dapat dihancurkan oleh militer Turki. Dampaknya sejak tahun 1924 Turki melarang penggunaan bahasa Kurdi di tempat umum.Operasi militer besar-besaran terus dilakukan untuk menumpas gerakan pro kemerdeaan yang mengakibatkan ribuan jiwa *kehilangan* nyawa.

Kekuatan terbesar Kurdi di Turki diwakili oleh Partai Pekerja Kurdistan (PKK).Pada tahun 1991 ketua PKK, Abdullah Oscalan, ditangkap oleh pemerintah Turki dan dijatuhi hukuman mati.Tekanan Turki ternyata mampu melemahkan tuntutan kemerdekaan yang memaksa PKK merubah orientasinya pada perjuangan otonomi daerah khusus Kurdistan. Pada sisi lain, keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa berdampak pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak minoritas. Hanya saja kebijakan semacam ini sering mendapatkan tantangan besar dari kelompok ultra nasionalis (sekuler) Turki.Operasi-operasi militer pun kemudian kerap dilakukan guna memberangus

kekuatan PKK.Apalagi wilayah perbatasan Turki-Irak memiliki potensi sumber alam yang melimpah (minyak, gas, air bersih dan sumber mineral) dan menjadi salah satu pusat investasi asing maka membiarkan rakyat Kurdi memerdekakan diri *tentu* sesuatu yang mustahil (*http://www.kurdistanica.com* diakses 25/8/2013).

Turki juga memiliki sejarah yang tidak begitu menyenangkan, Turki mendapat tuduhan melakukan genosida atau pembantaian masal terhadapat bangsa Armenia.Pada 1915, pemerintahOttoman memerintahkan semua orang Armenia dideportasikan dari Anatolia timur.Sekurang-kurangya 1 juta orang Armenia yang saat itu jumlah keseluruhannya sekitar 2 juta orang meninggal dalam suatu barisan paksa ke selatan yang dimulai pada 1915.Orang orang Armenia dan kebanyakan sejarahwan berpendapat bahwa bencana yang menimpa komunitas mereka adalah akibat kekejaman yang dilakukan atas petunjuk-petunjuk pemerintah Ottoman, dan bahwa hal itu merupakan genosida.sementara Turki menyangkal melakukan genosida (*http://www.armenian-genocide.org/chronology.html* diakses 25/8/2013).

Jumlah etnis Armenia yang saat ini hidup di Turki sesungguhnya mungkin lebih banyak.Setelah kejadian tragis 1915-1917, sejumlah anak Armenia menjadi yatim. Banyak dari anak yatim Armenia diangkat anak oleh keluarga-keluarga Muslim setempat, yang mengganti nama mereka dan membesarkan mereka secara Islam. Sementara para misionaris Kristen Barat dan orang-orang Armenia yang selamat mulai mencari dan mengklaim anak-anak yatim Armenia ini setelah Perang Dunia I, hanya sebagian kecil saja yang

ditemukan dan dipersatukan kembali dengan sanak keluarganya, sementara banyak lainnya tetap hidup sebagai orang Turki.Selain itu, sebagian keluarga Armenia menjadi Islam untuk menyelamatkan diri dari genosida.Karena itu, ada sejumlah orang yang berdarah Armenia di Turki saat ini yang tidak menyadari nenek moyang mereka adalah orang Armenia.

Pada awal Oktober 1920, Armenia ditujukan pemerintah Britania Raya, Perancis, Italia dan kekuatan Sekutu lainnya meminta mereka untuk memaksa orang-orang Turki menghentikan serangan mereka.Pada waktu itu Britania Raya masih berkonsentrasi pada pasukannya di Timur Tengah untuk menghancurkan pemberontakan suku di Mesopotamia (sekarang Irak). Perancis dan Italia memiliki masalah yang sama di Suriah, Cilicia dan Adalia .Satu-satunya negara yang memberikan dukungan kepada Armenia adalah Yunani.Namun dukungan militer Yunani tidak cukup untuk mengurangi tekanan dari Turki (*http://www.armenian.ch/asa/Docs/faae02.*pdf diakses 25/8/2013).

Menghadapi kehancuran total negara, pemerintah Armenia meminta gencatan senjata, dan pada 18 November tahun 1920, perjanjian gencatan senjata menyimpulkan. Dua minggu kemudian, pada tanggal 2 Desember, perjanjian damai baru ditandatangani oleh perwakilan Armenia dan Turki di Alexandropol.Kondisi dari perjanjian Alexandropol adalah Armenia menyerahkan lebih dari setengah wilayah nya (*www.conflicts.rem33.com/images/Armenia/turkarwar.htm* diakses 24/8/2013).

Mayoritas orang Armenia yang tinggal di Turki berada di İstanbul dan sekitarnya, mereka bekerja sebagai bankir dan pedagang. Orang-orang Armenia

memiliki koran-koran dan sekolah-sekolah mereka sendiri.Mereka berpegang pada iman Apostolik Armenia sendiri dan mengidentifikasikan diri sebagai orang Armenia dan bukan orang Turki.Selain itu. Pembentukan negara Armenia yang merdeka di perbatasan timur Turki setelah dibubarkannya Uni Soviet pada 1991 merupakan sumber kebanggaan etnis bagi orang-orang Armenia di Turki. Namun demikian, konflik Armenia dengan Azerbaijan yang beretnis Turki, ditambah dengan dukungan terhadap Azerbaijan di media Turki, telah membangkitkan kekhawatiran di antara minoritas Armenia tentang status masa depan mereka di Turki (*http://www.armenian-genocide.org/genocide.html* diakses 25/8/2013).

Komisi Uni Eropa juga menggaris bawahi permasalahan Cyprus dalam upaya pengajuan diri Turki menjadi anggota.Konflik ini terjadi antara Cyprus dengan Yunani sebagai akibat dari terbentuknya negara Cyprus.Negara Federasi Cyprus Turki (*Kibris Turk Federe Devleti*) yang didirikan di wilayah Cyprus utara pada Tahun 1975 ini adalah langkah awal pembentukan negara federasi Cyprus yang diduduki oleh komunitas Cyprus Turki. Pembentukan federasi tersebut tidak diakui oleh Cyprus Yunani yang berada di selatan dan dunia internasional. Selama periode tersebut, Turki merelokasi puluhan ribu warganya ke wilayah utara Cyprus sehingga wilayah utara pada perkembangannya didominasi oleh etnis Turki diikuti dengan eksodus besar-besaran etnis Yunani Siprus ke wilayah selatan

Cyprus wilayah utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 November 1983 dengan nama resmi Republik Turki Cyprus Utara (*Kibris Turk*

Federe Devleti) atau biasa disingkat Cyprus Utara yang beribukota di Nikosia bagian utara dengan Rauf Denktas sebagai presiden pertamanya. Deklarasi kemerdekaan tersebut tidak mendapat pengakuan oleh dunia internasional, kecuali oleh Turki sendiri, yang diikuti dengan aksi embargo dunia internasional terhadap Cyprus Utara.Pasca deklarasi kemerdekaan Cyprus Utara, PBB kemudian mendirikan *buffer zone* di daerah perbatasan Cyprus Utara dengan wilayah selatan Cyprus untuk mencegah terjadinya kekerasan dan konflik antar militer.

Di pihak Cyprus Yunani berpendapat bahwa tindakan etnis Cyprus Turki sebagai bentuk separatisme.Pihak Yunani Siprus juga mengklaim bahwa selama operasi militernya di Cyprus, militer Turki melakukan pembantaian pengusiran terhadap etnis Yunani Cyprus. Hingga sekarang, Turki masih menempatkan sekitar 40.000 personil militernya di Cyprus Utara namun sejak pembentukan Cyprus Utara dan *buffer zone* aksi-aksi kekerasan dalam skala besar tidak pernah terjadi lagi selain aksi-aksi demonstrasi insiden kecil antar tentara di perbatasan. Upaya-upaya pembicaraan terus dilakukan untuk memperbaiki relasi antara etnis Cyprus Turki dengan Cyprus Yunani demi mengupayakan penyatuan kembali Cyprus karena meskipun keberadaan Cyprus Utara tidak diakui dunia internasional, pemerintah de jure Cyprus tetap tidak mampu mengontrol wilayah Cyprus Utara yang masih ada di dalam kekuasaan Turki (*www.globalsecurity.org/military/world/war/cyprus2.htm*diakses 26/8/2013).

Pada tahun 2004, Komisi Eropa mengeluarkan keputusan bahwa negosiasi mengenai aksesi Turki harus segera dilaksanakan.Turki akan

mengadopsi kebijakan-kebijakan baru yang di targetkan selesai pada tahun 2008terkait dengan upaya Turki untuk memenuhi Kriteria Kopenhaggen secara luas, sepanjang tahun 2004-2008 Uni Eropa akan membuat laporan terkait sejauh mana upaya-upaya Turki memenuhi kriteria Kopenhagen.

Dengandemikian peneliti mengukuhkan untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Upaya Pemerintah Turki untuk Bergabung dengan Uni Eropa (2004-2008)"**

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional yaitu antara lain :

1. Pengantar Hubungan Internasional, merupakan peletak dasar bagi penelitian yang akan dilakukan, terkait hubungan para aktor yang melewati batas – batas negara.
2. Diplomasi HI di Eropa, dimana dalam penelitian ini terletak di kawasan Eropa dan mata kuliah ini telah memberikan pemetaan mengenai diplomasi di kawasan Eropa.
3. Organisasi dan Administrasi Internasional, merupakan fokus kajian peneliti terhadap permasalahan yang akan diteliti menyangkut keterlibatan salah satu Organisasi Internasional yang memberikan suatu rekomendasi terhadap negara terkait pembuatan kebijakan negara tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Sejauh mana Upaya yang telah dilakukan pemerintah Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor :

1. Upaya-upaya apa yang pemerintah Turki lakukan untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Turki dalam upayanya bergabung dengan Uni Eropa?
3. Bagaimana respon Uni Eropa terhadap keinginan Turki untuk dapat bergabung menjadi anggota Uni Eropa?
4. Bagaimanakan prospek Turki dalam keanggotaan Uni Eropa dimasa mendatang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Secara garis besar tujuan penulisan ini lebih diutamakan pada bagaimana perkembangan Turki dalam usahanya bergabung dengan Uni Eropa, yang dinilai sudah terlalu lama hanya berstatus calon dan belum diterima menjadi negara anggota.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Turki untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa.
3. Untuk mengetahui respon Uni Eropa terhadap keinginan Turki untuk dapat bergabung menjadi anggota Uni Eropa.
4. Untuk mengetahui prospek Turki dalam keanggotaan Uni Eropa dimasa mendatang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini ialah diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi dan pembelajaran yang tertarik untuk membahas masalah terkait dengan Negara turki dan organisasi internasional Uni Eropa sesuai topik penelitian yang dibahas kali ini.
2. Kegunaan Penelitian ini secara praktis ialah diharapkan dapat menambah wawasan tentang Hubungan Internasional dan dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat pada umumnya, mengenai kerjasama Internasional serta pengaruhnya terhadap kehidupan negara-negara anggotanya.